



RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN DHARMASRAYA

TAHUN 2021-2026



Ringkasan Eksekutif

1 Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 menyusun RPJMD 2021-2026. Penyusunan RPJMD sesuai amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menyusun Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS). Dalam Penyusunan KLHS sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 7/2018 perlu dipelajari dan dianalisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan);



11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Selain itu perlu diketahui pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha serta Akademisi. Selanjutnya hasil KLHS yang berupa rekomendasi perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan demikian diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan pencapaian TPB/SDGs.

Lebih jauh penyusunan kebijakan, rencana dan program yang akan dituangkan dalam RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diinginkan, yang sebelumnya telah dikaji secara mendalam sewaktu menyusun KLHS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD disusun sebelum dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian



target TPB/SDGs dan mengakomodir isu strategis TPB/SDGs yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJMD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
- d. Indikator TPB yang bukan kewenangan

2 Analisis Kondisi Umum Daerah

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 km² (296.113 ha), dengan persentase luas terhadap Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,197%. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya terletak pada koordinat 00°47'07" - 1°41'56" LS (Lintang Selatan) dan 101°09'21" - 101°54'27" BT (Bujur Timur). Secara administrasi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 nagari.

Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya yang berbukit dengan sedikit lahan yang datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut (dpl). Berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya, sekitar 21.797,3 Ha adalah kawasan lindung dan kawasan berfungsi lindung. Sedangkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 tentang Fungsi dan Status Kawasan Hutan, untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya seluas 92.150 Ha adalah kawasan hutan dimana 74.755 Ha adalah hutan produksi dan sisanya 17.395 Ha adalah hutan lindung, taman nasional dan cagar alam.

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Berdasarkan data informasi Peta Geologi



Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari:

1. Aluvium
2. Endapan Undak
3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan
4. Lava
5. Formasi Kasai
6. Formasi Rantaukil
7. Formasi Telisa, Anggota bawah
8. Formasi Gumai
9. Formasi Talang Akar
10. Formasi Sinamar
11. Granit
12. Porfir Kuarsa
13. Granodiorit
14. Formasi Barisan, Anggota batugamping
15. Formasi Barisan
16. Formasi Pelepat
17. Diabas, Basal
18. Formasi Silungkang
19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah
20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih
21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah 288.555 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah 2,78% dan kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 77,2 jiwa/km². Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi. Sesuai dengan karakteristik wilayah dan perkembangan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Dharmasraya ada 2 (dua) jenis yaitu bencana banjir dan kebakaran.

PDRB Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yakni pada tahun 2016 Rp. 8,437 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 10,344 triliun pada tahun 2019 (ADHB). Pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan menjadi Rp. 10,242 triliun atau turun sebesar Rp. 0,1 triliun atau Rp. 102.323.470.000,-. Sedangkan berdasarkan harga konstan. PDRB perkapita ADHB pada 2020 sebesar 40,48 juta rupiah, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sudah sebesar 41,71 juta rupiah. Sementara PDRB perkapita ADHK pada tahun 2020 mencapai 29,47 juta rupiah, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sudah sebesar 30,48 juta rupiah.

Distribusi PDRB di Kabupaten Dharmasraya terbesar adalah di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 27,19%. Sektor selanjutnya yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi Kabupaten Dharmasraya adalah sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor.



Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun 2017, dan menurun drastis pada tahun 2020 sebesar 6,63%. Penurunan terjadi hampir pada semua sektor lapangan usaha. Penurunan pada tahun 2020 dipicu karena pandemic Corona Virus Disease atau Covid-19 yang telah mengganggu aktivitas ekonomi. Lapangan usaha yang terdampak paling besar yakni sektor penyediaan akomodasi makan dan minum serta sektor transportasi dan pergudangan yakni sebesar 21,94% dan 21,49%.

Selama 5 tahun terakhir, Kabupaten Dharmasraya pernah menghasilkan kemampuan keuangan yang relatif tinggi 2 digit yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,43%. Namun kinerja ini tidak mampu dipertahankan, karena pada tahun-tahun berikutnya, kemampuan keuangan Kabupaten Dharmasraya hanya 1 digit saja dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 kemampuan keuangan Kabupaten Dharmasraya adalah 9,11%, dan turun menjadi 7,74% pada tahun 2019, dan turun menjadi 6,68% pada tahun 2020. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Secara keseluruhan nilai pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp875.195,93 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.019.358,07 juta pada tahun 2019, dan turun kembali menjadi Rp958.555,53 juta di tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena kebijakan pemerintah pusat mengurangi jumlah DAU untuk mengatasi kebutuhan dana pemerintah pusat untuk menanggulangi Covid-19.

Realiasi belanja Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari Rp 804.052,99 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 823.724,60 juta pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,61%. Di samping itu, Transfer Bagi Hasil ke Desa menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2016 jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa berjumlah Rp 77.828,61 juta pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 107.270,60 juta pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 8,35%. Akibatnya, jumlah Belanja dan Transfer Bagi Hasil Desa mengalami peningkatan dari Rp 881.881,60 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 930.995,20 juta pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,36%. Secara umum kinerja Belanja Kabupaten Dharmasraya relatif kurang baik karena pertumbuhan rata-rata per tahun dari Belanja Pegawai jauh lebih tinggi dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.



Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 nilai aset hanya sebesar Rp 2.119.569,75 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp2.429.453,623 juta pada tahun 2020, yang berarti dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,47%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar.

3 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan dan air bersih, serta sebagian besar sedang dan rendah untuk jasa penyediaan sumberdaya genetik. Bagian wilayah memiliki daya dukung tinggi untuk jasa pangan, air bersih adalah wilayah dimana kepadatan penduduk adalah tinggi, sehingga terancam terjadi alih fungsi lahan dan tingginya pencemaran air.

Jasa pengaturan yang daya tampungnya sebagian besar rendah dan sangat rendah adalah jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, dan pengolahan dan penguraian limbah. Sementara wilayah yang rendah dan sangat rendah daya tampungnya merupakan wilayah dimana terdapat permukiman masyarakat. Tekanan penduduk terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah besar peluangnya akan melampaui daya tampung. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin rentan terhadap bencana alam alam, termasuk banjir.

Kabupaten Dharmasraya juga memiliki daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika. Tentunya ini mengindikasikan sempitnya wilayah kabupaten ini yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang dapat aman dan layak.

Kabupaten ini juga memiliki daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar rendah dan sangat rendah untuk jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Kondisi mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Dharmasraya adalah sangat lamban terbentuknya lapisan tanah.

Disisi lain, Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan serat, penyediaan energy, Jasa



pengaturan kualitas udara, jasa pendukung siklus hara dan jasa pendukung biodiversitas. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar sangat tinggi dan tinggi ini belum didukung pemanfaatannya yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah. Gambaran umum DDDTLH Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya

No	Jasa Ekosistem	Persentase Luas DDDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
Jasa Penediaan				
1	Pangan	27,01	40,16	32,82
2	Air Bersih	8,60	41,84	49,56
3	Serat	99,06	0,24	0,70
4	Bahan Bakar	76,07	19,05	4,88
5	Sumberdaya Genetik	25,55	39,19	35,26
Jasa Pengaturan				
1	Iklm	60,70	38,02	1,28
2	Tata Aliran Air dan Banjir	21,75	39,37	38,88
3	Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	27,98	29,00	43,02
4	Pemurnian Air	54,34	44,81	0,85
5	Pengolahan dan Penguraian Limbah	16,98	26,28	56,74
6	Kualitas Udara	98,87	0,34	0,80
7	Penyerbukan Alami (Pollination)	57,97	40,77	1,25
8	Pengendalian Hama dan Penyakit	49,49	41,09	9,42
Jasa Budaya				
1	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	0,59	0,16	99,25
2	Rekreasi dan Ecotourism	24,84	55,25	19,91
3	Estetika	23,90	11,76	64,33
Jasa Pendukung				
1	Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	21,18	29,89	48,93
2	Siklus Hara (Nutrient Cycle)	80,21	11,51	8,28
3	Produksi Primer	42,60	18,69	38,70
4	Biodiversitas	93,19	5,99	0,82



4 Analisis Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan).

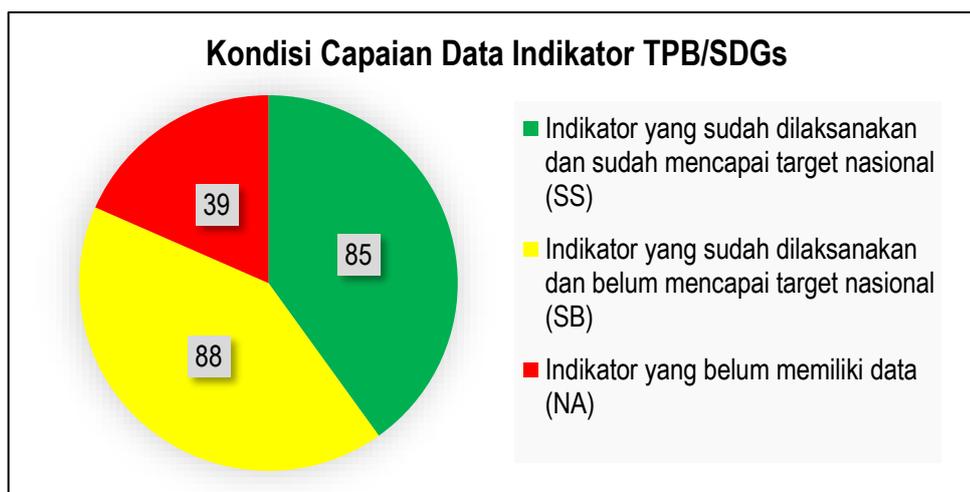
Sedangkan jumlah indikator dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut, terdapat 8 (delapan) indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya

Kondisi Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 85 indikator (40,09%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 88 indikator (41,51%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 39 indikator (18,40%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2. Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	85	40,09%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	88	41,51%
3.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	39	18,40%
TOTAL		212	100%

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2021



Gambar 1. Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional

Pilar dengan capaian kategori tertinggi adalah pilar sosial (48 indikator dengan kategori SS), diikuti dengan pilar ekonomi (19 indikator dengan kategori SS). Capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pilar dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar

TPB/SDGs	SS	SB	NA	Jumlah Indikator TPB
Pilar Sosial	48	31	17	96
Pilar Ekonomi	19	23	14	56
Pilar Lingkungan	8	27	4	39
Pilar Hukum dan Tata Kelola	10	7	4	21

Sumber : Hasil Analisis TPB 2021

Indikator TPB/SDGs kabupaten yang merupakan SPM adalah sebanyak 60 indikator dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau sebanyak 27,73 %, yang termasuk ke dalam 6 (enam) SPM sebagai berikut.

1. SPM Kesehatan

SPM Kesehatan sebanyak 26 Indikator atau 11,82 % dari seluruh indikator TPB dan 43,33 % dari indikator SPM

2. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

SPM ini sebanyak 10 indikator atau 4,55% dari seluruh indikator TPB dan 16,67 % dari indikator SPM

3. SPM Pekerjaan Umum

SPM Pekerjaan Umum sebanyak 7 indikator atau 3,18 % dan 11,67 % dari indikator SPM



4. SPM Pendidikan

SPM Pendidikan sebanyak 13 indikator atau 5,91 % dari seluruh indikator TPB dan 21,67 % dari indikator SPM

5. SPM Perumahan Rakyat

SPM Perumahan Rakyat sebanyak 1 indikator atau 0,45 % dari seluruh indikator TPB dan 1,67 % dari indikator SPM

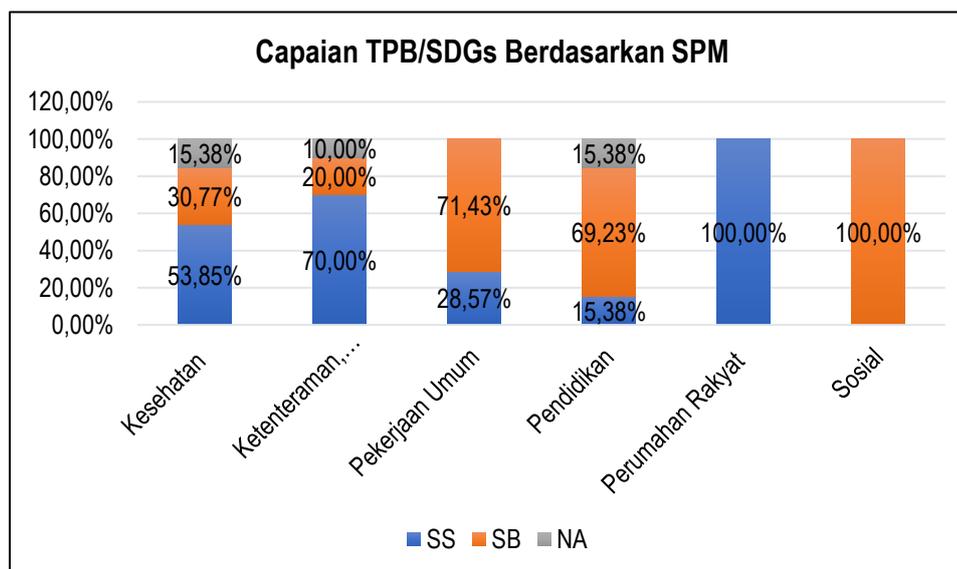
6. SPM Sosial

SPM Sosial sebanyak 3 indikator atau 1,36 % dari seluruh indikator TPB dan 5 % dari indikator SPM

Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan SPM sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Gambar sebagai berikut.

Tabel 4. Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Kabupaten Dharmasraya

No	SPM	SS		SB		NA		Total
1	Kesehatan	14	53,85%	8	30,77%	4	15,38%	26
2	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	70,00%	2	20,00%	1	10,00%	10
3	Pekerjaan Umum	2	28,57%	5	71,43%	0	0,00%	7
4	Pendidikan	2	15,38%	9	69,23%	2	15,38%	13
5	Perumahan Rakyat	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
6	Sosial	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	3
		26		27		7		60



Gambar 2. Grafik Capaian TPB/SDGs berdasarkan SPM



5 Rumusan Isu Strategis

Rumusan isu strategis hasil penjaringan dengan peserta konsultasi publik adalah:

1. Penurunan Kualitas Air
2. Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya
3. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
4. Peningkatan kasus narkoba
5. Illegal Mining
6. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan
7. Kurangnya peluang dan informasi kerja
8. Infrastruktur jalan
9. Minimnya pengembangan perumahan
10. Masih rendahnya jumlah dan kualitas destinasi wisata
11. Alih fungsi lahan
12. Meningkatnya kenakalan remaja
13. Fasilitas sanitasi dan drainase yang minimal
14. Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat
15. Peningkatan kapasitas SDM yang minim
16. Rendahnya nilai tambah produk pertanian

Setelah itu, dilakukan penapisan dengan menggunakan 5 kriteria berikut:

1. Karakteristik Wilayah
2. Tingkat Penting dan Luasnya Potensi Dampak
3. Keterkaitan antara Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan Isu Utama RPPLH
5. Keterkaitan dengan Isu DIKPLHD

Hasil penapisan isu strategis hasil konsultasi publik tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Hasil Konsultasi Publik

Ranking	No isu	Isu PB STRATEGIS	Jumlah Skor
1	1	Penurunan Kualitas Air	657
2	2	Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya	628
3	5	Illegal Mining	627
4	11	Alih fungsi lahan	561



Ranking	No isu	Isu PB STRATEGIS	Jumlah Skor
5	3	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	550
6	16	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	524
7	4	Peningkatan kasus narkoba	522
8	8	Infrastruktur jalan	517
9	6	Rendahnya kualitas infrastruktur jalan	514
10	12	Meningkatnya kenakalan remaja	508
11	13	Fasilitas sanitasi dan drainase yang minimal	503
12	15	Peningkatan kapasitas SDM yang minim	502
13	14	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat	480
14	7	Kurangnya peluang dan informasi kerja	476
15	10	Masih rendahnya jumlah dan kualitas destinasi wisata	468
16	9	Minimnya pengembangan perumahan	424
17	17	Tingginya Pemakaian Pupuk Kimia	318

Setelah dilakukan penapisan isu di atas, disepakati 7 isu prioritas Kabupaten Dharmasraya yaitu:

Tabel 6. Isu Prioritas Kabupaten Dhamasraya

Ranking	No isu	Isu PB STRATEGIS	Jumlah Skor
1	1	Penurunan Kualitas Air	657
2	2	Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya	628
3	5	Illegal Mining	627
4	11	Alih fungsi lahan	561
5	3	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	550
6	16	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	524
7	14	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat	480

Rumusan isu strategis berdasarkan evaluasi TPB dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Evaluasi TPB

No	Bidang	Isu Strategis
1	Pendidikan	SPM 1. Belum banyak daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)



No	Bidang	Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum tercapainya target peningkatan proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 3. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 4. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 5. Belum tercapainya target peningkatan Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. 6. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 7. Belum tercapainya target keseimbangan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 8. Belum tercapainya target peningkatan Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. 9. Belum tercapainya target peningkatan Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 10. Belum dilakukan upaya meningkatkan Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. <p>NON SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia data proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
2.	Kesehatan	<p>SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 2. Belum tercapainya target penurunan Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.



No	Bidang	Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 4. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 5. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 6. Belum dilakukan upaya penurunan Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). <p>NON SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 2. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta. 3. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis 4. Belum tercapainya target penurunan Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. 5. Belum tercapainya target Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 6. Belum tercapainya target Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 7. Belum tercapainya target penurunan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 8. Belum tercapainya target peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 9. Belum dilakukan upaya penurunan Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.



No	Bidang	Isu Strategis
		10. Belum dilakukan upaya penurunan Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 11. Belum dilakukan upaya penurunan Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
3	Pekerjaan Umum	SPM <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2. Belum tercapainya target peningkatan Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 4. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 5. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 6. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. NON SPM <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 2. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 3. Belum tercapainya target Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 4. Belum tercapainya target Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.



No	Bidang	Isu Strategis
		5. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
4	Perumahan Rakyat	SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. NON SPM -
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	SPM 1. Belum tercapainya target Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 2. Belum tercapainya target penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 3. Belum tercapainya target penurunan Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 4. Belum tercapainya target penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 5. Belum tercapainya target penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 6. Belum dilakukan upaya penurunan Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. NON SPM 1. Belum tercapainya target penurunan Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 2. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 3. Belum dilakukan upaya penurunan Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.



No	Bidang	Isu Strategis
		4. Belum dilakukan upaya penurunan Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
6	Sosial	SPM <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 2. Belum tercapainya target peningkatan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. NON SPM <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 2. Belum ada upaya peningkatan Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 3. Belum ada data Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 4. Belum ada upaya penurunan Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
7	Lingkungan Hidup (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target penyediaan Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 2. Belum tercapainya target jumlah Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 4. Belum tercapainya target Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 5. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 6. Belum tercapainya target Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 7. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.



No	Bidang	Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Belum tercapainya target Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 9. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 10. Belum tercapainya target Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. 11. Belum tercapainya target penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
8	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Belum tercapainya target peningkatan Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
9	Ketenagakerja-an (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan." 2. Belum tercapainya target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 3. Belum tercapainya target penurunan Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 4. Belum tercapainya target peningkatan Persentase tenaga kerja formal. 5. Belum tercapainya target penurunan Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 6. Belum tercapainya target penurunan Tingkat setengah pengangguran.



No	Bidang	Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Belum tercapainya target penurunan Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 8. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 9. Belum dilakukan upaya peningkatan Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 10. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
10	Statistik (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per kapita. 2. Belum tercapainya target peningkatan PDB per kapita. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. 4. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). 5. Belum dilakukan pengukuran Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
11	Pangan (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target penurunan Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
12	Keuangan (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. 2. Belum tercapainya target peningkatan Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. 3. Belum tercapainya target peningkatan Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.



No	Bidang	Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Belum tercapainya target peningkatan Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 5. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 6. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 7. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 8. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
13	Kependudukan dan Cacatan Sipil (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya data Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
	komunikasi & informatika (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Belum ada data Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. 3. Belum dilakukan upaya peningkatan penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. 4. Belum ada data Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.
	koperasi, usaha kecil, & menengah (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
	Pariwisata (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 2. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah wisatawan mancanegara.



No	Bidang	Isu Strategis
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 4. Tidak ada data Jumlah devisa sektor pariwisata.
	Pemberdayaan masyarakat & desa (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target penurunan Jumlah desa tertinggal. 2. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah Desa Mandiri. 3. Tidak ada data Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
	Perindustrian (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. 2. Belum ada data Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. 3. Belum ada data Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.



6 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tabel 8. Bidang Pendidikan Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Mengembangkan system Pendidikan layanan khusus	Pengembangan SDM untuk Pendidikan layanan khusus Peningkatan Kualitas Sarana dan prasarana Pendidikan layanan khusus Pengembangan model Pendidikan layanan khusus Pengembangan regulasi Pendidikan layanan khusus Peningkatan peran serta stokes holder dalam pengembangan Pendidikan layanan khusus	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan. 1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum.
2	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar	Meningkatkan kompetensi siswa terhadap literasi dan numerasi	Peningkatan sarana prasarana penunjang pencapaian kompetensi minimum Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan Peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pencapaian standar kompetensi minimum	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		Pengembangan perpustakaan masyarakat	
3	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan	<p>Penyediaan reward dan punishment bagi keluarga anak usia SD</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam menyediakan bantuan Pendidikan bagi keluarga kurang mampu</p> <p>Penguatan Kerjasama dengan Lembaga dan pihak swasta terkait</p> <p>Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang Pendidikan</p> <p>Peningkatan muatan bahan ajar berbasis keagamaan dan muatan lokal.</p> <p>Peningkatan akhlak pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Program pengelolaan Pendidikan.</p> <p>1.01.03 s.d. 05.</p>
4	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan SMP/MTs/ sederajat.	<p>Peningkatan sarana dan prasarana SMP sesuai dengan standar kelayakan</p> <p>Pengembangan transportasi untuk Pendidikan</p>	<p>Program pengelolaan Pendidikan.</p> <p>1.01.03 s.d. 05.</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang pendidikan</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam menyediakan bantuan Pendidikan bagi keluarga kurang mampu</p> <p>Pengembangan muatan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat</p>	
5	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	<p>Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan</p> <p>Mendorong pengembangan dan peningkatan mutu perguruan tinggi di Dharmasraya</p>	<p>Peningkatan kampanye atau sosialisasi tentang Pendidikan</p> <p>Pemberian beasiswa atau bantuan bagi siswa yang kurang mampu</p> <p>Pengembangan SMK yang relevan</p> <p>Penguatan program satu rumah satu sarjana</p> <p>Pengembangan Kerjasama dengan PTN dan PTS</p> <p>Pengembangan kemudahan pendirian kampus</p>	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
6	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatkan sistem pengelolaan dan kualitas PAUD	<p>Penataan sarana dan prasarana PAUD sesuai dengan standar</p> <p>Peningkatan SDM</p> <p>Pengembangan kurikulum PAUD (termasuk Pendidikan keagamaan)</p> <p>Peningkatan peran nagari dalam pengembangan PAUD</p> <p>Note. Memikirkan alternatif pengelolaan PAUD</p>	<p>1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.</p> <p>1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum.</p>
7	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	<p>Meningkatkan kualitas Pendidikan dasar dan menengah</p> <p>Meningkatkan akses ke perguruan tinggi</p>	<p>Peningkatan akreditasi sekolah dari SD, SMP, dan SMA</p> <p>Peningkatan peran stakeholder dalam mendorong angka partisipasi sekolah</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar dan menengah</p> <p>Peningkatan kualitas administrasi pendidikan</p> <p>Pengembangan Kerjasama dengan PTN dan PTS</p>	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			Penguatan program satu rumah satu sarjana Peningkatan peran serta	
8	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Mengembangkan Pendidikan keaksaraan fungsional	Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal Pengembangan Tenaga Pendidik Keaksaraan Fungsional Peningkatan dukungan penyelenggaraan Pendidikan keaksaraan fungsional	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan. 1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkatkan kompetensi profesional Tenaga Pendidik	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Peningkatan Kesempatan Untuk memenuhi standar kompetensi professional Pengembangan klinik menuju peningkatan akreditasi Peningkatan koordinasi untuk mendorong peningkatan peluang akreditasi	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan. 1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10	4.6.1.(b)		Pengembangan Lembaga Pendidikan non formal	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatkan kesempatan untuk mengikuti program paket A, paket B, dan paket C	Pengembangan Tenaga Pendidik Keaksaraan Fungsional Peningkatan infrastruktur Pendidikan keaksaraan	

Tabel 9. Bidang Kesehatan Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan layanan pada ibu hamil dan ibu melahirkan	Peningkatan koordinasi dengan jaring dan jejaring Peningkatan sistem rujukan Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan	1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
3	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkatkan system pendataan sasaran Meningkatkan layanan kesehatan pada balita	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang persalinan di Faskes Peningkatan verifikasi dan validasi data Pengembangan sarana prasarana pendukung sistem pendataan Peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan Peningkatan sarana prasarana Peningkatan kuantitas dan pemerataan tenaga kesehatan Pengembangan sistem rujukan	1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya Kesehatan 1.02.04 Program sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
4	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Mengembangkan persepsi publik tentang pentingnya imunisasi dasar.	Pengembangan Kerjasama dengan lintas sektor, tokoh masyarakat Peningkatan sosialisasi tentang kesehatan balita Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Peningkatan kerjasama dengan MUI, lintas sektor, tokoh adat dan TOMA Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat imunisasi Peningkatan promosi Kesehatan melalui sosial media	1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan
9	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang	Meningkatkan layanan pada ibu hamil dan ibu melahirkan bagi masyarakat miskin	Peningkatan akses pelayanan dan dukungan persalinan bagi masyarakat miskin	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
5	<p>proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</p> <p>3.7.1*</p> <p>Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.</p>	Meningkatkan keterlibatan PUS dalam ber-KB	<p>Peningkatan verifikasi dan validasi data</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan</p> <p>Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap program KB</p> <p>Peningkatan jumlah tenaga penyuluh KB di Kecamatan dan kader KB</p> <p>Peningkatan akses terhadap layanan KB</p> <p>Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra kerja</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB</p> <p>Pengembangan kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>	<p>Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan</p> <p>Program : pembinaan keluarga berencana (kb)</p> <p>Sub Program:</p> <p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas</p> <p>Lapangan KB (PKB/PLKB)</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
12	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Meningkatkan kualitas pengelolaan keluarga berencana	<p>Pengembangan system insentif dan dis insentif terhadap peserta KB</p> <p>Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi sehat</p> <p>Peningkatan koordinasi dan regulasi ketersediaan data berbasis gender</p> <p>Pendewasaan usia kawin</p> <p>Peningkatan pembangunan keluarga dan genre</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait tentang kesehatan reproduksi</p> <p>Peningkatan pengetahuan kelompok sasaran terhadap reproduksi sehat dan program KB</p>	<p>2 08 04 Program peningkatan kualitas keluarga</p> <p>2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (kb)</p>



Tabel 10. Bidang Pekerjaan Umum Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi parapihak dan masyarakat dalam pengembangan sanitasi layak	<p>Pengembangan basis data untuk penyediaan sanitasi yang layak</p> <p>Penyediaan sanitasi berbasis masyarakat</p> <p>Pengembangan kapasitas kelompok untuk pengelola sanitasi komunal</p> <p>Pengembangan pemanfaatan sistem pengolahan air limbah setempat dan terpusat</p> <p>Pengembangan kerjasama dengan tokoh masyarakat lokal / pemangku adat/ ulama dalam upaya merubah prilaku masyarakat.</p> <p>Peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi</p>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum	Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air minum yang tersedia di Kabupaten Dharmasraya.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	layanan sumber air minum layak.		<p>Pengembangan partisipasi pemangku adat, nagari dan OPD terkait dalam menjaga keberlangsungan sumber air.</p> <p>Pengembangan regulasi dalam menjaga k3 sumber daya air.</p> <p>Pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan bagi masyarakat</p> <p>Peningkatan kapasitas masyarakat dan SDM pengelola sumber daya air</p>	
2	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3) sumber Air Baku	<p>Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air baku yang tersedia di Kabupaten Dharmasraya.</p> <p>Peningkatan Kerjasama dengan pemangku adat, nagari dan OPD terkait dalam menjaga keberlangsungan sumber air.</p> <p>Pengembangan regulasi dalam menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) sumber daya air.</p>	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			Pengembangan sistem sistem sarana dan prasarana air baku (embung, waduk sebagai cadangan sumber air baku)	
4	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) air minum	<p>Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air minum yang tersedia di Kabupaten Dharmasraya.</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat (pemangku adat, nigari) dan OPD terkait dalam menjaga keberlangsungan sumber air.</p> <p>Pengembangan regulasi dalam menjaga K3 sumber daya air.</p> <p>Peningkatan infrastruktur penyediaan air minum</p>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
5	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Mengembangkan dukungan untuk ketersediaan sanitasi yang layak	<p>Pengembangan basis data untuk penyediaan sanitasi yang layak</p> <p>Penyediaan sanitasi berbasis masyarakat</p> <p>Pembentukan kelompok pengguna pengelola sanitasi komunal</p>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>Pengembangan pemanfaatan sistem pengolahan air limbah setempat dan terpusat</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat</p>	
6	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan implementasi konservasi sumber air minum	<p>Pengembangan basis data penduduk yang memiliki sumber air minum aman dan berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan Kerjasama konservasi sumber-sumber air antar para pihak</p> <p>Penguatan Kerjasama dengan tokoh adat/pemangku adat/nagari untuk menjaga kelestarian hutan</p> <p>Pengembangan infrastruktur pengolahan air minum</p>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Tabel 11. Bidang Perumahan Rakyat Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
----	---------------	----------------	------------------	----------------------------------



3	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatkan dukungan bagi ketersediaan rumah layak huni serta PSU yang layak	Peningkatan kerjasama penyediaan rumah layak huni	Program pengembangan perumahan
			Pengembangan basis data untuk penyediaan hunian layak Peningkatan pemahaman masyarakat tentang urgensi rumah layak huni	Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Tabel 12. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatkan pencegahan dan mitigasi bencana terhadap warga Negara yang berada di daerah rawan bencana	Peningkatan system dasar penanggulangan bencana daerah (termasuk peningkatan koordinasi antar sector) Peningkatan kapasitas satgas dalam penanggulangan bencana Pengembangan basis data penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten /Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan warga Negara yang berada pada daerah rawan bencana</p> <p>Peningkatan infrastruktur ramah lingkungan yang berfungsi mencegah dan mengurangi dampak bencana</p>	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Mengembangkan basis data spasial kebencanaan	<p>Pengembangan dokumen KRB, RPB, dan dokumen rencana kontigensi</p> <p>Peningkatan koordinasi antar sektor menuju pengembangan infrastruktur tangguh bencana</p> <p>Pengembangan regulasi menuju terwujudnya bangunan tangguh bencana</p> <p>Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur kebencanaan</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p>
3	11.5.1*	Mengembangkan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana	Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		<p>Peningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan dan penurunan resiko bencana</p> <p>Peningkatkan kerjasama dalam penanggulangan bencana</p>	<p>Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.</p>
				<p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>
4	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunkan tingkat resiko bencana	<p>Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana</p> <p>Pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang sadar dan peduli bencana</p> <p>Peningkatan infrastruktur berbasis mitigasi bencana</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Mengembangkan sistem pengurangan resiko bencana	<p>Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana</p> <p>Pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang sadar dan peduli bencana</p> <p>Peningkatan infrastruktur berbasis mitigasi bencana</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>
6	13.1.1*		Pengembangan infrastruktur berbasis mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Mengembangkan infrastruktur bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim	Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana	<p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>
7	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menekan jumlah korban bencana yang diakibatkan perubahan iklim	<p>Pengembangan infrastruktur bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim</p> <p>Peningkatan partisipasi publik dalam mitigasi perubahan iklim.</p> <p>Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang diakibatkan perubahan iklim.</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			Peningkatan koordinasi lintas sektor	<p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>
8	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Meningkatkan kapasitas pengendalian dampak bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi	<p>Optimalisasi penataan ruang (pada pusat-pusat pertumbuhan)</p> <p>Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana</p> <p>Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana</p> <p>Peningkatan kerjasama antar mitra dalam penanggulangan bencana</p> <p>Pengembangan regulasi penurunan risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi</p> <p>Peningkatan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>



Tabel 13. Bidang Sosial Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang miskin dan rentan terhadap layanan publik	<p>Pengembangan regulasi pelayanan publik yang inklusif</p> <p>Peningkatan infrastruktur publik yang ramah disabilitas</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang miskin dan rentan</p> <p>Pengembangan teknologi pelayanan publik yang ramah bagi disabilitas</p> <p>Peningkatan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas baik secara psikis maupun fisiologis</p>	<p>Program : Rehabilitasi sosial</p> <p>Sub Program:</p> <p>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas</p> <p>Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p>
3	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Mengembangkan tata kelola penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa	<p>Peningkatan kemampuan petugas dalam penyediaan layanan tanggap bencana (tagana)</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana layanan tanggap bencana</p>	<p>Program: penanganan bencana</p> <p>Sub Program:</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			Peningkatan koordinasi system layanan tanggap bencana Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
4	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Mengembangkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas pendampingan psikososial	Peningkatkan kualitas SDM tenaga pendamping korban bencana social Peningkatan sarana dan prasarana pendampingan psikososial Peningkatan partisipasi masyarakat lokal (ada pelibatan guru BK, Alim Ulama, ninik mamak)	Program: Penanganan bencana Sub Program: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota



7 Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration. Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan “*No one left behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”.

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan focus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Peran OPD Kabupaten Dharmasraya dalam Pencapaian Target TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Peran OPD Kabupaten Dharmasraya dalam Pencapaian Target TPB/SDGs

No	Organisasi Perangkat Daerah dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/SDGs
1	Bag Adm Pembangunan	Tujuan 16; 17
2	Bagian Organisasi	Tujuan 16
3	Bagian Hukum	Tujuan 16
4	Bag. Perekonomian dan SDA	Tujuan 1
5	Bappeda	Tujuan 1; 8; 9; 10; 17
6	BKD	Tujuan 1; 16; 17
7	BKPSDM	Tujuan 5
8	BPBD	Tujuan 1; 11; 13
9	BPS	Tujuan 8; 9; 17
10	Dinas Kesehatan	Tujuan 1; 2; 3; 6



No	Organisasi Perangkat Daerah dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/SDGs
11	Diskominfo	Tujuan 4; 5; 9; 16; 17
12	DLH	Tujuan 6; 11; 12; 15
13	Dinas Pangan dan Perikanan	Tujuan 2
14	Dinas Perhubungan	Tujuan 9
15	Dinas Perkim	Tujuan 1; 6; 11
16	Dinas Pertanian	Tujuan 2
17	Dinsos P2KBP3A	Tujuan 1; 3; 5; 10; 16
18	Disbudparpora	Tujuan 8; 11
19	Dinas Pendidikan	Tujuan 1; 4
20	Disdukcapil	Tujuan 1; 16; 17
21	Diskumperdag	Tujuan 8; 9
22	Disnakertrans	Tujuan 1; 8; 10
23	DPMD	Tujuan 10
24	DPMPTSP	Tujuan 8; 9
25	DPUPR	Tujuan 6; 11
26	Inspektorat	Tujuan 16
27	Kesbangpol	Tujuan 10; 16

Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran dalam kegiatan pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, perubahan sosial lainnya. Untuk menggerakkan filantropi dan pebisnis, diperlukan fasilitasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Filantropi dan bisnis setidaknya dapat memberikan peran dalam pelaksanaan TPB/SDGs baik dalam pengembangan bisnis (ekonomi) maupun bantuan sosial serta lingkungan. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendisemiasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.



8 Rekomendasi

Tabel 15. Rekomendasi terkait isu strategis Hasil Konsultasi Publik Kabupaten Dharmasraya

No	Isu Prioritas	Faktor Penyebab	Rekomendasi Arah Kebijakan
1	Penurunan Kualitas Air	Erosi, Limbah pabrik, Limbah Pertanian dan Limbah domestik, Penambangan di Sungai, Pembuangan sampah ke Sungai,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengendalian erosi melalui peningkatan tutupan vegetasi, 2. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah domestik. (IPAL Komunal). 3. Mengendalikan kegiatan pertambangan di Sungai. 4. Meningkatkan pengawasan pembuangan limbah industri. 5. Menguatkan tata Kelola pengendalian pencemaran dan implementasi regulasi.
2	Peningkatan Timbulan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ragam sumber sampah; 2. Rendahnya kapasitas pengelolaan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pengelolaan sampah 3R. 2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. 3. Mendorong pemanfaatan sampah untuk energi.
3	Illegal Mining	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya Peluang Mata Pencaharian. 2. Tingginya permintaan bahan galian. 3. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ragam usaha dan peningkatan akses permodalan usaha. 2. Meningkatkan upaya pencarian bahan alternatif diperbaharui dan daur ulang. 3. Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk penegakan hukum.



No	Isu Prioritas	Faktor Penyebab	Rekomendasi Arah Kebijakan
4	Alih Fungsi lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemukiman; 2. Pengembangan infrastruktur jalan dan Gedung; 3. Pemanfaatan hutan untuk perkebunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pemukiman hemat lahan (rumah susun sewa). 2. Mengembangkan rekayasa pembangunan infrastruktur (jalan layang) 3. Mengembangkan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Memperkuat implementasi regulasi pemanfaatan ruang. 5. Mengembangkan LP2B dan mengembangkan insentif implementasi regulasi.
5	Rendahnya derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan masyarakat 2. Rendahnya pengetahuan Kesehatan dan perilaku hidup sehat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan 2. Mengembangkan infrastruktur pendukung pola hidup sehat (lapangan olah raga, dll) 3. Mengintensifkan pengembangan pengetahuan pola hidup sehat
6	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum bertumbuhnya industri pengolahan hasil; 2. Belum optimalnya pengembangan pasar produk pertanian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian. 2. Meningkatkan kapasitas pengolahan pasca panen. 3. Mengembangkan kelembagaan pemasaran yang sehat dan Tangguh.



No	Isu Prioritas	Faktor Penyebab	Rekomendasi Arah Kebijakan
7	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat	Tingginya intensitas perkembangan budaya hedonic.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pendidikan keagamaan formal dan non formal. 2. Mengembangkan infrastruktur peningkatan kualitas implementasi ajaran agama (perpustakaan, museum, rumah tahfiz). 3. Mengembangkan Pendidikan agama dalam keluarga. 4. Meningkatkan partisipasi Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam implementasi nilai-nilai agama.

Rekomendasi terkait DDDTLH:

1. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan
2. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah
4. Memberikan perlindungan terhadap sumberdaya genetic
5. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
6. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat.
7. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industry
8. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman, tanpa merusak daya dukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan permukiman vertical
9. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan



10. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kekayaan biodiversitas, pengembangan energy baru dan terbarukan.

Untuk pencapaian target tentu saja arah kebijakan dan program yang telah dijalankan saat ini perlu dilanjutkan. Perlu diketahui bahwa target yang ditetapkan dalam TPB adalah target pada tahun 2030, sehingga bila memang saat ini target tersebut belum tercapai perlu dibuat target antara sampai akhir periode RPJMD (tahun 2026).

Memperhatikan lebih jauh kondisi pencapaian target saat ini diperkirakan penyebab belum tercapainya target tersebut karena beberapa hal di bawah ini:

1. Target yang ditetapkan adalah target nasional dan merupakan target yang dirumuskan sesuai Perpres No 59/2017.
2. Adanya perbedaan nomenklatur dalam indikator untuk pencapaian target.
3. Belum adanya kesesuaian antara arah kebijakan departemen terkait yang membawahi OPD pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. OPD pelaksana masih merujuk pada indikator dan target yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Misalnya Dinas Kesehatan tentu lebih memprioritaskan pencapaian target sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan
4. Terlalu detailnya indikator yang terdapat dalam pencapaian TPB yang sebagian sudah tercakup dalam indikator yang telah ada.
5. Terdapat indikator yang secara budaya dan pandangan hidup masyarakat memerlukan penyesuaian kembali. Indikator tentang gender dan HAM yang merujuk kepada standard internasional perlu didiskusikan lebih saksama.

Untuk itu arah kebijakan yang telah ada memerlukan penyesuaian sedemikian rupa sehingga dapat diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang memang terarah kepada pencapaian target.



LAMPIRAN



LAMPIRAN TABEL RINGKASAN EKSEKUTIF

TUJUAN		<p>TPB 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan)</p> <p>TPB 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak)</p>						
1.	ISU STRATEGIS	Penurunan Kualitas Air						
2.	INDIKATOR	Baseline 2020	Rata-rata			r (%)	Th.2030	
			Mean	Median	Modus			
	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	60 %	67 %	67 %	-	40 %	100 %
	6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	87,28 %	89,25 %	89,25 %	-		
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	87,28 %	93,75 %	93,75 %	-	12,72 %	100 %
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	NA	82,5 %	82,5 %	-	100 %	100 %
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi	NA	73,75 %	72,5 %	-	100 %	100 %



	layak dan berkelanjutan.						
3.	PERMASALAHAN						
	1. Masih terdapat daerah yang belum menerima layanan air minum/air bersih 2. Masih terdapat daerah yang belum terpenuhi sanitasi layak						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur terkait dengan pelayanan dasar						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN						
	Indikatif dana Rp 218.084.074.000,- yang bersumber dari APBD/APBN						

TUJUAN		<p>Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)</p> <p>Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)</p>					
1.	ISU STRATEGIS	Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya					
2.	INDIKATOR	Baseline 2020	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	12.5.1.(a)	Peningkatan Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	6.217,4 (Perlu ditetapkan target lokal Dharmasraya)	13.333	13.500	-	20 ton
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	6,7 %	74,92 %	75 %	73 %	80 %
3.	PERMASALAHAN						
	1. Timbulan sampah yang terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk 2. Masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah 3. Masih rendahnya pengelolaan sampah baik penanganan dan pengurangan sampah 4. Peningkatan ragam sumber sampah, Rendahnya kapasitas pengelolaan,						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah 2. Meningkatkan pengelolaan sampah melalui 3R						



5.	KOMPOSISI PENDANAAN
	APBN/APBD dengan indikatif dana Rp 4.051.000.000,- sumber dana berasal dari APBD/APBN

TUJUAN		TPB 15. ; Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati					
1.	ISU STRATEGIS	Alih fungsi lahan					
2.	INDIKATOR	Baseline Tahun 2020	Rata-rata Target 2021 - 2026			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	21,97 %	21,97 %	21,97 %		Meningkat
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0,2 %	0,2 %	0,2 %		5,5 Juta ha skala nasional
3.	PERMASALAHAN						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemukiman 2. Pengembangan infrastruktur jalan dan Gedung 3. Pemanfaatan hutan untuk perkebunan 						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	Mengembangkan LP2B dan mengembangkan insentif implementasi regulasi.						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN						
	Indikatif dana Rp 2.700.000.000,- dengan sumber dana berasal dari APBD						



TUJUAN		Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)					
ISU STRATEGIS		Rendahnya derajat kesehatan masyarakat					
INDIKATOR		Baseline 2020	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	9,65 %	82,33 %	82 %	-	85,35 %	95 %
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	14,37 %	7,63%	9,3 %	-	-	Menurun
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	51,92 %	86,16 %	86 %	85 dan 90	43,08	95 %
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	58 %	63.16 %	63,% %	-	8 %	66 %
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	NA	118	39,5	40	-	38
PERMASALAHAN							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan masyarakat 2. Rendahnya pengetahuan Kesehatan dan perilaku hidup sehat 							
SASARAN STRATEGIS							



<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Mengembangkan infrastruktur pendukung pola hidup sehat (lapangan olah raga dll) Mengintensifkan pengembangan pengetahuan pola hidup sehat
KOMPOSISI PENDANAAN
Indikatif dana sampai tahun 2026 Rp 10.217.286.000,- sumber dana berasal dari APBD/APBN

TUJUAN		TPB 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)					
1.	ISU STRATEGIS	Rendahnya nilai tambah produk pertanian					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
		2020	Mean	Median	Modus		
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Na	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3.	PERMASALAHAN						
	<ol style="list-style-type: none"> Belum bertumbuhnya industri pengolahan hasil Belum optimalnya pengembangan pasar produk pertanian 						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian Meningkatkan kapasitas pengolahan pasca panen Mengembangkan kelembagaan pemasaran yang sehat dan Tangguh. 						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN						
	Indikatif dana Rp 1.000.000.000,- sumber dana APBD						



TUJUAN		TPB 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan) TPB 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas)						
1	ISU STRATEGIS	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat						
2	INDIKATOR	Base line Tahun 2020	Target 2021 - 2026			r(%)	Th.2030	
			Mean	Median	Modus			
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat menjadi 450	
	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	0	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	106,62 %	108,10 %	108,10 %	7,47 %	Meningkat Menjadi 114,09 %	
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	99,04 %	100 %	100 %	7,9 %	Meningkat Menjadi	



		SMP/MTs/ sederajat						106,94 %
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	8,2	8.55	8.55	-	0,6	Meningkat menjadi 8,8 Tahun
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	47,64 %	71,73 %	71,39 %	-	-	Meningkat menjadi 77,2 %
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat ; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	99.31	99.64	99.74	-		Meningkat
		Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun						
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	93,42 %	94,75 %	94,75 %	-	2,68 %	Meningkat menjadi 96,1%
3	PERMASALAHAN							
	Tingginya intensitas perkembangan budaya hedonic.							
4	SASARAN STRATEGIS							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pendidikan keagamaan formal dan non formal. 2. Mengembangkan infrastruktur peningkatan kualitas implementasi ajaran agama (perpustakaan, museum, rumah tahfiz). 3. Mengembangkan Pendidikan agama dalam keluarga. 4. Meningkatkan partisipasi Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam implementasi nilai-nilai agama. 							



5	KOMPOSISI PENDANAAN
	Total Indikator Anggaran Sampai tahun 2026 Rp 65.986,272,249 yang bersumber dari APBD dan APBN

TUJUAN		TPB 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)					
1.	ISU STRATEGIS	Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	100,59	101,55	101,55		Meningkat
3.	PERMASALAHAN						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian Organik Memerlukan Pupuk Organik dan Pestisida Organik. Fakta Lapangan : 2. Komposisi Sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 70 % adalah sampah organik terbuang di TPA 3. Sampah sayur-sayuran dari daerah pertanian dibuang ke danau dan sungai <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Sentra Pertanian dan Lokasi Sentra Perternakan berjauhan sedangkan keduanya dibutuhkan untuk pembuatan pupuk Organik 2. RT telah diminta memilah sampah organik tapi belum didukung dengan pengangkutan terpisah ataupun program pemanfaatan pemanfaatan perkarangan untuk tanaman obat, dan dapur hidup 						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	<p>Meningkatnya pendapatan, petani pertanian (Tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)</p> <p>Meningkatnya pendapatan petani hutan</p>						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN						
	Indikatif dana Rp 1.547.462.000.000,-						



TUJUAN		<p>TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)</p> <p>TPB 14. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim)</p>					
1.	ISU STRATEGIS	Akses UMKM ke layanan keuangan masih minim					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan.	15	25	25		30%
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.					Meningkat
	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	meningkat				
	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil					
3.	PERMASALAHAN						
	<p>1. Akses permodalan untuk UMKM melalui KUR masih tinggi bunganya</p> <p>2. Permodalan UKM dengan BUMN, Swasta dan masyarakat belum optimal terjalin</p>						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	<p>Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera</p>						



5.	KOMPOSISI PENDANAAN
	APBD Indikatif dana Rp 315.652.000.000,-

TUJUAN		TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)					
1.	ISU STRATEGIS	Akses permodalan untuk UMKM melalui KUR masih tinggi bunganya Permodalan UKM dengan BUMN, Swasta dan masyarakat belum optimal terjalin					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan.	15	25	25		30%
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.					Meningkat
3.	PERMASALAHAN						
	Daya saing produk-produk UMKM masih rendah dengan produksi-produk dari luar sumbar						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN						
	APBD Indikatif dana Rp 315.652.000.000,-						



TUJUAN		TPB/SDGs 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)					
1.	ISU STRATEGIS	Infrastruktur yang ndustr untuk penunjang transportasi massal					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	34%	39%	39%		46%
3.	PERMASALAHAN						
	Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pariwisata						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN						
	Indikatif dana Rp 3,536.782.000.000,-						

TUJUAN		TPB 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)					
1.	ISU STRATEGIS	Eksport produk-produk UMKM masih bawah tangan					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan.	15	25	25		30%
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.					Meningkat



3.	PERMASALAHAN
	Proses ekspor produk daerah dirasakan berbelit-belit oleh produsen/ ndustry kecil
4.	SASARAN STRATEGIS
	Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera
5.	KOMPOSISI PENDANAAN
	APBD Indikatif dana Rp 315.652.000.000,-

TUJUAN		TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) TPB 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)					
1.	ISU STRATEGIS	Jumlah timbulan sampah rumah tangga yang didaur ulang masih sedikit					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	62,41	68,71	68,71		80%
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	60%	70	70		80%
3.	PERMASALAHAN						
	<ol style="list-style-type: none"> Komposisi Sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 70 % adalah sampah organik terbuang di TPA Tingkat Layanan Kabupaten/kota hanya 40% Sampah organik berupa sayur-sayuran dari daerah pertanian dibuang ke danau dan sungai . Sedangkan sampak Tandan Kosong Sedar (TKS) hanya dimanfaatkan di areal perkebunan dan menjadi masalah karena menumpuk Lokasi Sentra Pertanian dan Lokasi Sentra Perternakan berjauhan sedangkan keduanya dibutuhkan untuk pembuatan pupuk Organik RT telah diminta memilah sampah organic tapi belum didukung dengan pengangkutan terpisah ataupun program pemanfaatan pemanfaatan perkarangan untuk tanaman obat, dan dapur hidup 						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas						



5.	KOMPOSISI PENDANAAN
	APBD Rp 121.736.761.328

TUJUAN		TPB 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak)					
1.	ISU STRATEGIS	Lahan kritis yang tertangani belum sebanding dengan tingkat kerusakan					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	1	1		1
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	200.000 ha	50.000 ha	50.000 ha	50.000 ha	300.000 ha
3.	PERMASALAHAN						
	1. Belum optimalnya penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Degradasi keanekaragaman hayati						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	Sasaran Misi 3 : Meningkatnya Kawasan hutan yang dikelola masyarakat						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN						
	APBD Rp 220.072.000.000,- APBN Rp 7.901.275.000						



TUJUAN		TPB 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)					
1.	ISU STRATEGIS	Pengelolaan Limba B3					
2.	INDIKATOR	Baseline	Rata-rata			r(%)	Th.2030
			Mean	Median	Modus		
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	100	100	100	100	100
3.	PERMASALAHAN						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah B3 Medis yang dihasilkan sebesar 7,2 ton/hari dan diangkut ke pulau jawa (industri pemusnah) 2. Minimnya transportasi limbah B3 pada daerah-daerah tertentu 						
4.	SASARAN STRATEGIS						
	Persentase penanganan LB3						
5.	KOMPOSISI PENDANAAN						
	APBD dengan Rp 91.500.000						